

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI VIII
NOVEMBER 2016



TRANSFORMASI DAYA GEMPUR
MENJADI DAYA SAING
SEBAGAI PERWUJUDAN
SEMANGAT KEPAHLAWANAN

Irjen. Pol. Drs. Bambang Hermanu, S.H., M.M
JENDERAL POLISI YANG SEDERHANA DAN
BERVISI LUAS

1 0 November diputuskan sebagai tanggal untuk memperingati Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya, seperti perkataan Bung Karno “Negara yang Besar adalah yang Tidak Melupakan ‘Jas Merah’.” Artinya tidak akan melupakan sejarah suatu bangsa tersebut. Para pahlawan rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan negara Indonesia. Tanpa jasa mereka, kita tidak bisa menjadi bangsa dan negara Indonesia seperti sekarang. Kita harus mampu mengenang dan menghargai perjuangan, pengorbanan para pahlawan dan pemimpin bangsa yang menjadi simbol negara Indonesia. Itulah sebabnya, sejarah bangsa ini telah mendokumentasikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah “hadiah” dari bangsa lain, melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan jiwa raga para syuhada, pejuang serta *founding fathers* (Bapak-Bapak Bangsa) se-Nusantara dengan aneka keragaman latar belakangnya. Mereka berjuang dan berkorban, sejak periode “merebut kemerdekaan” hingga periode kritis ketika harus “mempertahankan kemerdekaan” yang telah diproklamasikan.

Namun, sangat disayangkan mutu peringatan itu terasa menurun dari tahun ke tahun, terutama generasi muda. Generasi muda sudah makin tidak menghayati makna Hari Pahlawan. Hari Pahlawan yang selalu kita peringati hendaknya jangan hanya mengedepankan unsur seremoni belaka, tanpa menghayati nilai-nilai perjuangan yang dipesankan oleh para pahlawan ini. Akan sangat ironi bila memperingati Hari Pahlawan sebatas seremoni saja tanpa mengambil tauladan dari nilai-nilai perjuangan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemuda tidak benar-benar mengisi kemerdekaan ini dengan belajar untuk membangun bangsa nya.

Negara kita sedang diwarnai kasus korupsi yang sudah mencapai stadium akhir, karena sudah melibatkan para pejabat tinggi dan yang paling menyedihkan sudah melibatkan para penegak hukumnya sendiri dimana semestinya mereka memposisikan diri sebagai pemberantas korupsi. Namun kini justru kebalikan dari semua itu.

Permasalahan bangsa yang begitu banyak, pelik dan terkadang membingungkan, sangat lah bertentangan dengan semangat perjuangan yang telah dikobarkan oleh para pahlawan. Para pahlawan melakukan perjuangan dalam rangka untuk melakukan pembebasan bangsa ini dari tirani. Tirani kehidupan, tirani korupsi, tirani pembodohan, tirani kejahilan, dan sebagainya. Bukan sebaliknya. Dengan banyaknya problem bangsa ini membuktikan kita masih belum bisa menghargai para pahlawan bangsa ini.

Diperlukan sosok-sosok masa depan yang memiliki sikap untuk membebaskan bangsa dari tirani. Keluar dari keterpurukan, keluar dari kebodohan, dan keterbelakangan. Karakteristik seorang pahlawan adalah jujur, pemberani, dan rela melakukan apapun demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang harus berjuang untuk menjadi pahlawan.

Karena itu, mari sama-sama kita sejenak mengeheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita.

November 2016

REDAKSI

Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 Transformasi Daya Gempur menjadi Daya Saing sebagai perwujudan Semangat Kepahlawanan



- 6 Krisis Energi? Saatnya Menggunakan PLTN!

TAJUK UTAMA



- 9 Refleksi Hari Pahlawan

PROFIL



- 14 Irjen. Pol. Drs. Bambang Hermanu, SH, MM.
Jenderal Sederhana dan Bervisi Luas

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 16 Pemerintah Bentuk Tim
Saber Pungli

INFO KITA



- 18 Studi Banding Tim PPKN ke Australia
Government Crisis Coordination Center
(AGCCC)



- 20 **Setjen Wantannas** Selenggarakan
Bakohumas Bahas Penyelamatan
Generasi Muda dari Narkoba

Inspirasi Bulan Ini

“Jadikan Hati sekuat Elang”

Ada banyak hal yang akan membuat kita seringkali mengalami sebuah kegagalan di dalam hidup ini, baik berupa kesengajaan ataupun karena faktor lainnya yang dilakukan tanpa kita sadari. Pada dasarnya, semua ini bisa saja membuat kita selalu terpuruk dan tidak bisa melangkah maju untuk meraih keberhasilan dalam hidup.

Entah suka atau tidak, pada dasarnya kita memang seringkali tidak menyadari jika kita telah memelihara banyak kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Kita bisa belajar tentang nilai sebuah perubahan dari elang yang gagah yang merupakan unggas dengan umur terpanjang di dunia, yakni bisa mencapai 70 tahun lamanya. Namun ketahuilah bahwa hal ini tidak bisa dicapai dengan mudah, sebab di usia 40 tahunan elang harus memilih sebuah keputusan berat di dalam hidupnya. Pada usia ini cakarnya mulai melemah, paruhnya bertambah panjang dan membengkok, dan bahkan sayapnya menjadi berat akibat ditumbuhi bulu yang lebat. Elang akan kesulitan untuk terbang, bahkan mencari makan.

Elang dihadapkan pada 2 pilihan sulit, antara melakukan sebuah transformasi yang sangat berat dan menyakitkan atau berdiam sambil menunggu kematiannya. Untuk bertahan hidup, elang harus memilih transformasi yang panjang dan memakan waktu hingga 150 hari. Dia akan berupaya keras untuk terbang dan mencapai puncak gunung dan kemudian membuat sarang di tepi sebuah jurang yang terjal, elang akan tinggal di sana dan menjalani transformasinya.

Hal pertama yang akan dilakukannya adalah mematok-matukkan paruhnya yang tua ke permukaan bebatuan yang keras, hingga paruh itu tanggal dari mulutnya. Elang akan berdiam selama beberapa waktu dan menunggu tumbuhnya paruh yang baru. Dengan paruh baru tersebut, elang akan menanggalkan satu persatu cakarnya dan menunggu hingga cakar tersebut tumbuh kembali. Cakar yang baru ini akan digunakan untuk mencabuti bulu tubuhnya satu persatu, yang tentu saja sangat menyakitkan. Dibutuhkan waktu hingga 5 bulan, agar bulu-bulu tersebut tumbuh kembali, setelah itu elang yang gagah dapat terbang dan menjelajahi angkasa kembali dengan perkasa selama 30 tahun ke depan.

Ini tentu bukan sebuah proses yang mudah, yang bisa dilalui hanya dalam waktu sekejap saja. Begitu juga dengan perubahan di dalam diri kita, terkadang kita harus melaluinya dengan sangat menyakitkan, melelahkan dan bahkan begitu menyedihkan. Namun, itu semua akan sesuai dengan hasil yang baik dan perubahan yang kita dapatkan.

Cerita tentang kisah elang yang gagah ini mengajarkan kita untuk berusaha apabila ingin melakukan perubahan demi mencapai hidup yang lebih baik. ****

Desi Fajar Wita



TRANSFORMASI DAYA GEMPUR MENJADI DAYA SAING SEBAGAI PERWUJUDAN SEMANGAT KEPAHLAWANAN

Oleh: Haryo B. Rahmadi, SE, Msi (Han).
Pengajar Pascasarjana Universitas Pertahanan
Pakar Tetap Dewan Ketahanan Nasional

Jelang peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November, berbagai tema, motto, dan slogan tentang penerjemahan nilai-nilai kepahlawanan ke dalam realita sehari-hari muncul memenuhi berbagai sudut kota dan desa. Tidak hanya sekedar kewajiban seremonial tahunan semata, hal ini sebenarnya menjadi “bantuan pengingat” agar Hari Pahlawan tidak tenggelam sebagai “peringatan” belaka. Lebih dari itu, kita semua bangsa Indonesia sepatutnya harus bisa melanjutkan semangat juang para pahlawan di dalam alam kemerdekaan yang tentunya tidak lagi dominan dalam bentuk mengangkat senjata.

Ada kisah menarik dari negeri Matahari Terbit, Jepang, dalam suatu karya sastra berjudul “Musashi”, karya Eiji Yoshikawa. Al kisah, Miyamoto Musashi, tokoh utama dalam karya tersebut, seorang pengikut jalan pedang yang melegenda dengan “Gaya Dua Pedang”-nya, suatu ketika terpaksa mengistirahatkan kedua pedangnya. Ia dan muridnya berdiam untuk beberapa waktu di padang Hotengahara yang tandus, mengerjakan suatu pekerjaan yang dianggap pekerjaan sia-sia, yaitu mencangkul lahan untuk membuat parit pengairan.

Ketika suatu hari padang Hotengahara kedatangan gerombolan bandit, Musashi segera meninggalkan pekerjaan mencangkulnya untuk mengangkat pedang membasmi bandit-bandit pengganggu. Para petani pun tergerak untuk turut mengangkat pedang bersama Musashi. Namun, sebelum meninggalkan Hotengahara, ia berpesan kepada para petani, bahwa senjata mereka adalah cangkul dan alat pertanian, dan para petani harus tetap bersemangat melawan kekeringan sebagai musuh sehari-harinya, dan perjuangan mereka terletak pada upaya membangun kehidupan pertanian yang baik. Demikianlah ternyata, jalan pikir seorang

Musashi menerjemahkan jiwa kepahlawanan yang sangat dalam tertanam di sanubarinya, dengan tidak merubah panggilannya melawan musuh, namun hanya mengganti definisi musuh. Semua demi kepentingan sesama manusia.

Sebagaimana Musashi yang menukar pedangnya dengan cangkul untuk memerangi kekeringan, wujud kepahlawanan saat ini dapat disalurkan melalui berbagai bidang kehidupan. Di sana lah daya gempur akan bertransformasi menjadi daya saing. Beralih dari Jepang, di Amerika Serikat (AS) para ahli sudah banyak membahas mengenai daya saing, misalnya Professor Michael Porter dari *Harvard Business School* yang pada tahun 1990 merumuskan model *Porter Diamond* atau Berlian Porter dalam artikel Ilmiahnya yang berjudul “*Competitive Advantages of Nations*” atau Daya Saing Bangsa-Bangsa. Model Porter Diamond menjabarkan bahwa daya saing sebuah bangsa dalam lapangan ekonomi dan bisnis, terletak pada empat faktor utama, yaitu: 1) iklim bisnis dan persaingan yang kondusif untuk memungkinkan keberlanjutan dan ketahanan usaha, 2) pengetahuan mengenai pasar (potensi konsumen), dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasar atau konsumen itu sendiri tentang produk yang tersedia, 3) sumber daya yang memadai dalam segi jumlah, kualitas, dan keragamannya, serta 4) jaringan industri yang solid untuk menghasilkan aneka produk dan jasa. Dalam bahasa yang sederhana, model Porter Diamond menjelaskan bahwa ketahanan dari suatu usaha sangat tergantung kondisi sumber daya, kecerdasan produsen dan konsumennya yang saling mengasah, serta jaringan usaha yang saling mengisi urutan logika yang berbeda, kemampuan untuk mengembangkan sumber daya juga sangat tergantung dari ketahanan dan keamanan berbisnis, kecerdasan produsen dan konsumennya, serta jaring-

an usaha yang saling mengisi. Dapat pula dari sisi pandang lain dirumuskan bahwa kecerdasan produsen dan konsumen sangat tergantung keamanan berbisnis yang memungkinkan bisnis untuk berlanjut dan menjadi media pengasahan kemampuan, keberlanjutan pasokan sumberdaya, serta jaringan bisnis yang mendukung. Intinya, keempat elemen daya saing tersebut bagaikan memiliki hak veto sehingga kehilangan satu elemen akan menghilangkan elemen yang lain secara simultan.

Masih dari Amerika Serikat (AS), terdapat pula suatu konsep strategis yang disebut pendekatan DIME. DIME adalah singkatan dari *Diplomacy, Informational, Military, dan Economy*. Keempatnya dianggap sebagai representasi pokok dari instrumen kekuatan nasional AS yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. D. Robert Worley, seorang peneliti senior di *the Johns Hopkins University Center for Advanced Governmental Studies*, dalam bukunya "*Orchestrating the Instruments of Power: A Critical Examination of the U.S. National Security System*" yang diterbitkan oleh University of Nebraska Press pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pendekatan DIME ini telah dipakai di AS sejak tahun 1960-an.

Berdasarkan pendekatan DIME, kemampuan militer AS harus ditopang oleh kemampuan memperoleh akses di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya menjamin terciptanya kekuatan ekonomi, serta tentunya memberi manfaat bagi peningkatan pengaruh di tingkat global. Di lingkungan pergaulan global, kemampuan di tiga bidang tersebut membuat AS memiliki daya diplomasi yang kuat. Penghilangan salah satu komponen misalnya diplomasi, akan melemahkan posisi tawar di bidang ekonomi, juga membatasi akses terhadap informasi, serta tentunya mengurangi keberhasilan kerja sama militer. Agak serupa dengan Porter, *Diplomacy* menjadi representasi jaringan bisnis, *Informational* menjadi representasi kecerdasan, *Military* menjadi representasi keamanan berbisnis, dan *Economy* merpresentasi faktor sumberdaya, dan keempat elemen instrumen kekuatan nasional AS tersebut juga memiliki hak veto satu sama lain sehingga kehilangan satu instrumen akan menghilangkan instrumen yang lain secara simultan.

Pada konteks Indonesia, jika masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sangat dekat generasi orang tua kita, maka generasi sekarang haruslah mewarisi nilai-nilai kepahlawanan yang sama, dan mengalami perjuangan itu sendiri. Dalam era globalisasi ini, perjuangan menciptakan daya saing dan kemampuan memaksimalkan kekuatan nasional merupakan pokok bahasan utama demi mengatasi musuh alami generasi sekarang. Kita berada pada zaman dimana cita-cita para pendahulu kita harus bisa diwujudkan, yaitu masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana Musashi, yang tidak merasa perlu merubah petani menjadi prajurit dan pendekar, maka generasi sekarang harus mampu mengenali apa yang sebenarnya menjadi musuh mereka dan apa yang perlu dibangun untuk

menghadapinya. Untuk itu, sebagaimana dampak globalisasi sudah melingkupi Indonesia, maka ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu bercermin pada upaya bangsa lain, dan belajar dari kedalaman nilai-nilai luhur bangsa.

Pendekatan DIME, sebagaimana Berlian Porter, mensyaratkan adanya partisipasi warga AS di berbagai bidang untuk menjamin tercapainya kepentingan nasional. Hal ini bisa jadi merupakan cerminan sifat-sifat kepahlawanan. Jika demikian adanya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Indonesia harus segera mengikuti setiap perkembangan pemikiran dan pendekatan dari luar demi bisa mewujudkan semangat kepahlawanan melalui partisipasi dalam pembangunan?

Jawaban bagi pertanyaan di atas ternyata sudah ada di dalam tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jauh melampaui AS, Indonesia sudah lebih dulu menegaskan keharusan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (pertahanan/militer), mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan dan informasi), memajukan kesejahteraan umum (ekonomi), serta turut melaksanakan ketertiban dunia (diplomasi). Konsep dalam DIME yang baru dicetuskan di tahun 1960-an ternyata sudah disadari para pendiri negara kita sejak tahun 1945. Di dalamnya juga mengandung pesan membangun berbagai kemampuan yang mendahului apa yang dirumuskan Porter pada tahun 1990.

Di tengah arus informasi global yang semakin cepat dan meluas, dinamika persaingan di berbagai bidang dan tataran pun meningkat. Di sini lah relevansi transformasi daya gempur menjadi daya saing sebagai perwujudan semangat kepahlawanan dan terimakasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan. Namun sayangnya, banyak dari kita yang dalam melakukannya lebih sibuk bercermin ke luar dan lupa atau enggan menggali ke dalam. Entah karena merasa bahwa perspektif asing lebih mentereng, atau karena memang khazanah kearifan bangsa kita sudah makin dalam terkubur.

Maka sebagai refleksi atas segenap pemaparan di atas, Indonesia sebagai negara, maupun sebagai bangsa, baik secara bersama maupun secara individual oleh rakyatnya sebagai pribadi, sebenar-benarnya lah perlu menggali kembali dalam jati dirinya berbagai nilai yang bisa menjadi dasar pedoman guna menapaki masa depan dan mengisi kemerdekaannya. Pembukaan UUD'45 yang di antaranya memuat tujuan negara kita, ternyata tidak hanya sangat kontekstual, namun juga terbukti sangat visioner karena mampu mendahului pemikiran-pemikiran negara berkuasa di dunia, dan bahkan valid secara ilmiah mendahului suatu institusi pendidikan global yang sudah teramat sangat kesohor.****



Gambar oleh: Google

KRISIS ENERGI?

SAATNYA MENGGUNAKAN PLTN!

Oleh: Kolonel Laut (E) Supendi, ST.

Indonesia dengan penduduk besar dan sumberdaya alam melimpah terkendala oleh minimnya infrastruktur dan efektivitas implementasi kebijakan untuk menjadi negara besar berprestasi tinggi. Di antara faktor yang dapat mempercepat perubahan infrastruktur adalah dengan percepatan penyediaan tenaga listrik termasuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakannya dengan tetap menjaga komitmen terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tanpa mengurangi arti dari upaya perbaikan yang telah dicapai di bidang ketenagalistrikan, sesungguhnya percepatan dapat ditingkatkan lagi dengan menyertakan peran pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang selama ini tertunda oleh karena salah persepsi tentang faktor keselamatan dan kelayakannya di Indonesia.

Target RUEN Tidak Tercapai Tanpa Mengoptimalkan Nuklir
 Sumber BPPT Energi Outlook Indonesia 2016, hal 60



SITUASI KELISTRIKAN NASIONAL

Menurut BPPT-EOI 2016, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi fosil di antaranya minyak, gas dan batubara. Pada tahun 2014, cadangan terbukti minyak sebesar 3,6 miliar Barel, gas sebesar 100,3 TCF dan cadangan batu

bara sebesar 32,27 miliar ton. Bila diasumsikan tidak ada penemuan cadangan baru, berdasarkan rasio R/P (*Reserve/Production*) tahun 2014, maka minyak bumi akan habis dalam 12 tahun, gas bumi 37 tahun, dan batubara 70 tahun. Cadangan ini bahkan akan lebih cepat habis dari tahun yang disebut di atas karena kecenderungan produksi

Potensi galian nuklir Indonesia tersebar di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan Papua. dengan hanya mengandalkan dari tersedia 120 000 ton torium di Babel (dapat diketahui karena produk samping dari perusahaan tambang timah) akan cukup untuk memenuhi situasi listrik Indonesia tahun 2014 (50 GWe) selama 120 tahun tanpa daur ulang atau selama 2400 tahun dengan cara daur ulang torium. Jika dengan kapasitas 100 GW, yaitu perkiraan situasi kapasitas pembangkitan tahun 2025, maka akan mencukupi selama 60 tahun tanpa daur ulang atau selama 1200 tahun dengan daur ulang. Situasi listrik di luar Jawa-Bali, selain minim infrastruktur, mengalami krisis berlarut larut yang memaksa dilakukan pemadaman bergilir dan impor dari negara tetangga.

Di Jawa-Bali, sebagai pusat Industri dan dengan penduduk sekitar 150 juta melampaui Jepang dengan 127 juta, kelistrikannya mengalami kerentanan security of supply karena sumber energinya dari luar dan beban berat lingkungan karena mengandalkan sumber fosil terutama batubara. Hasil studi BPPT melalui publikasi Energi Outlook Indonesia-2016 menunjukkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang diharapkan Indonesia, maka akan terjadi defisit pada sektor EBT sebesar 10,5 % pada tahun 2025 dan 16% pada tahun 2050 atau masing-masing secara berurutan sebesar 12 GW dan 69 GW apabila opsi nuklir tidak dioptimalkan.

energi fosil yang terus meningkat. Di sisi sumber lain peran dari Energi Baru Terbarukan (EBT) non nuklir masih mengalami berbagai kendala antara lain kebergantungan pada lokasi sumber, harga pembangkitannya masih jauh di atas energi fosil, termasuk rendahnya minat investor, secara keseluruhan berkombinasi sehingga menuntut atau berdampak pada kebutuhan subsidi listrik.

OPSI NUKLIR OPTIMAL SEBAGAI PENGUNGKIT

Pada situasi saat ini dan di masa depan PLTN bukan lagi opsi terakhir melainkan menjadi opsi optimal untuk mengatasi kebutuhan energi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup menuju Indonesia sebagai negara besar berprestasi tinggi. Harapan ini dapat diwujudkan dengan menetapkan kriteria keselamatan dan kelayakan (keekonomian) pada setiap persyaratan pembangunan PLTN. Kriteria sistem keselamatannya yaitu secara umum menerapkan sistem keselamatan pasif dan kriteria kelayakannya secara umum terjangkau masyarakat (non-subsidi) dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) optimal. Para pelaku industri akan berinovasi (dan berinvestasi) mencapai persyaratan tersebut dengan mencari calon lokasi dan rumpun teknologi PLTN untuk memenuhi 12 GWe pada 2025 dan 69 GWe pada 2050. Dengan teknologi PLTN mutakhir, penyediaan listrik dapat dilakukan dengan mendekati pusat pertumbuhan ekonomi bukan dengan memaksa pelaku ekonomi melaksanakan kegiatan pada lokasi sumber energi di mana infrastrukturnya belum memadai.

Mewujudkan PLTN secara selamat dan layak di Indonesia merupakan amanat UU 17/2007 tentang RPJP dan PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Terlambatnya kehadiran PLTN untuk menyokong pembangunan nasional merupakan salah satu contoh dari berbagai masalah nasional dikarenakan konflik antar sektoral yang tidak berorientasi pada kepentingan yang lebih tinggi. UU 17/2007 RPJP mengamankan kehadiran PLTN pada tahun 2015-2019, sedangkan PP 14/2015 RIPIN mengamankan untuk mewujudkan PLTN pada tahun 2020-2035. Amanat dari peraturan perundangan ini rupanya telah dimaknai secara berbeda oleh pelaku yang menerapkan peraturan perundangan di sektor energi.

Keraguan terhadap opsi nuklir karena faktor SDM yang dianggap tidak memadai adalah tidak tepat. Reaktor Serba Guna di Serpong, Tangerang Selatan dengan sistem keselamatan yang analog PLTN telah beroperasi lebih dari 29 tahun dengan selamat dan mendukung program aplikasi nuklir. Juga telah ditunjukkan di bidang lain bahwa putra putri Indonesia jika diberi kepercayaan akan mampu berprestasi. Untuk satu unit PLTN diperlukan kurang

lebih 200 orang. Adapun kekhawatiran masalah limbah PLTN sebetulnya dapat diatasi dengan teknologi isolasi geologik dalam bawah tanah. Lebih jauh lagi, kekhawatiran terhadap kecelakaan karena teroris dan bencana alam, saat ini telah tersedia PLTN berteknologi keselamatan pasif sehingga PLTN secara alami padam aman sendiri tanpa bantuan operator dan catudaya sampai cukup waktu bantuan dari luar untuk pemulihan kembali.

Karena opsi nuklir tergolong energi kerapatan tinggi (*high density energy*), maka bahan bakar dapat terjamin dalam jangka panjang (*security of energy supply*) dengan cara menyediakan kebutuhannya, jika perlu, seumur pembangkit. listrik di dalam fasilitas ruang, yang relatif kecil. Nilai positif lain dari opsi nuklir yaitu memenuhi komitmen nasional untuk mengurangi tingkat polutan lingkungan yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim sekaligus menanggulangi defisit listrik nasional jangka menengah dan panjang.

Keraguan terhadap opsi nuklir karena faktor SDM yang dianggap tidak memadai adalah Tidak Tepat

Gambar Survei Pendapat Masyarakat Tentang penerimaan PLTN untuk mengatasi kelistrikan nasional oleh pihak independen (atas permintaan BATAN).

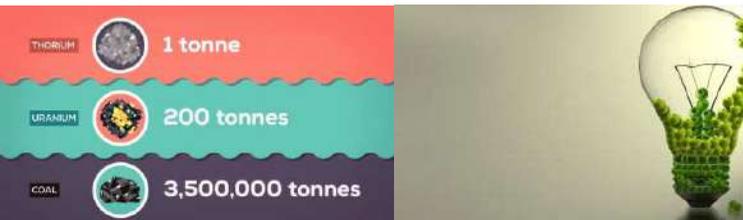


FAKTOR RESIKO

Pengalaman global dalam mengelola PLTN telah mencapai sekitar 60 tahun dengan penyempurnaan teknologi dilakukan terus menerus oleh industri nuklir berdasarkan tiga kali kecelakaan penting di Fukushima-Japan, Chernobil-Ukraina, dan Three mile island-USA. Untuk pembangunan PLTN selanjutnya, pengalaman kecelakaan karena faktor manusia dan alam telah diperhitungkan sehingga akan menerapkan Sistem Keselamatan Pasif yaitu sistem keselamatan PLTN harus mampu bertahan tanpa bantuan operator dan catudaya sampai cukup waktu untuk pemulihan kembali oleh bantuan dari luar (operator dan catudaya). Perbaikan disain PLTN tersebut dilakukan dengan tetap menjaga keekonomiannya dalam rangka kelayakan kompetisi. Kekhawatiran dalam pengelolaan PLTN di berbagai negara yang terlanjur mempunyai PLTN generasi lama agar disikapi seca-

ra wajar karena situasinya berbeda dengan yang akan dialami Indonesia.

REKOMENDASI DAN LANGKAH IMPLEMENTASI



Dengan menyelaraskan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, kajian, dan situasi kelistrikan nasional, peserta Diklat Pim I Angkatan 33 LAN mengajukan Kebijakan Nuklir Optimal yaitu andil nuklir pada tahun 2025 dan 2050 berurutan sekurang-kurangnya 10,5% (12 GWe) dan 16% (69 GWe) sehingga target RUEN untuk EBT pada kurun waktu yang sama dapat dicapai yaitu berurutan sebesar 23% dan 31%.

SKENARIO PROYEK PLTN

1) Komersial segera dilaksanakan melalui penawaran terbuka terhadap pelaku industri yang merupakan wujud dari kemitraan pelaku nasional dan global untuk memenuhi kriteria PLTN bersistem keselamatan pasif, non-subsidi, dan TKDN optimal. Dengan cara ini akan diperoleh pilihan terbaik dari berbagai proposal (kemitraan) kepada Indonesia.

2) PLTN non-komersial jalur penguasaan teknologi juga dilaksanakan secara bersamaan dengan didukung oleh pelaku industri dari PLTN komersial (skenario 1) dalam rangka menjaga kompetensi SDM. Informasi berikut memperkuat usulan kebijakan opsi nuklir optimal. Agar opsi nuklir terwujud sesuai harapan tersebut, maka pada awalnya diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan secara cepat dan bertahap guna memberikan situasi kepastian dalam pengusahaan industri nuklir nasional. Bersamaan dengan itu, untuk memastikan dan mengawal manfaat holistik dari opsi nuklir, maka pada tahap awal program nuklir nasional diperlukan NEPIO (Nuclear Energy Program Implementing Organization) sebagai wadah pemangku kepentingan nasional (Regulator, Pemerintah, Industri, Operator listrik, Perguruan tinggi, dan lainnya) yang dapat membahas berbagai kemungkinan persoalan konflik kepentingan dan teknis sehingga diperoleh kesiapan road map, public acceptance, industri nasional, dan tahapan penguasaan dan pengembangan teknologi PLTN melalui RDE. Untuk butir yang terakhir pendekatannya adalah

kesuksesan industri nuklir untuk “menghidupi” litbang sebagai solusi dari sangat minimnya anggaran litbang nuklir dari APBN.

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebijakan energi nuklir perlu dilaksanakan secara konsisten dan holistik dengan memaknai “opsi terakhir” menjadi “opsi nuklir optimal” sebagai solusi masalah kelistrikan nasional dan berkeadilan.

DAFTAR ACUAN

1. UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. UU No 17 Tahun 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
3. UU No 10 tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
4. PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
5. PP No 14 Tahun 2015 tentang RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) thn 2015 -2035
6. BPPT, Energy Outlook Indonesia 2016
7. IAEA Advanced Reactors Information system

Publik Terkesan masih menganggap nuklir sebagai sesuatu yang berbahaya, terutama dampak radiasi dan limbah. Namun demikian, hasil survey atas permintaan BATAN kepada pihak independen pada Th 2015 penerimaan terhadap PLTN 75,3 % secara nasional dan untuk masyarakat di luar Jawa kurang lebih 80 % (berharap dapat mengatasi krisis listrik). Bahkan Co-Founder of Greenpeace (NGO) Dr. Patrick Moore sekarang sudah mendukung PLTN karena PLTN untuk tujuan damai, lebih bersih dan ramah lingkungan.

Dengan segera menetapkan kebijakan opsi nuklir optimal, maka akan memberikan hasil sikap optimis terhadap ukuran penting dari keberhasilan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang seperti terpenuhinya target EBT 23% pada 2025 dan 31% pada 2050, kedaulatan energi dan daya saing nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk penguasaan teknologi.****



Dalam menyikapi suatu peristiwa yang sangat besar seperti peringatan Hari Pahlawan, sesungguhnya tidak cukup hanya sekedar memasang bendera, mengikuti upacara peringatan, mengheningkan cipta, mendengarkan pidato inspektur atau pembina upacara, membaca doa. Selesai titik. Tanpa ada penghayatan dan refleksi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penggiat nilai jati diri dan karakter bangsa mensinyalir bahwa dari tahun ke tahun, merasakan adanya penghayatan yang semakin menurun dan cenderung menjadi kosong, lebih terasa hambar dan peringatan Hari Pahlawan cenderung bersifat seremonial.

Lebih dari itu, refleksi Hari Pahlawan merupakan satu perenungan bersama seluruh anak bangsa, sejauh mana putra-putri bangsa ini sebagai bagian dalam proses mengisi pembangunan bangsa dan negara ke depan? Tantangan yang dihadapi di masa sekarang dan yang akan datang dapat diprediksi semakin berat dan multi kompleks. Oleh karena itu refleksi nilai kepahlawanan sangat diperlukan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di era global. Jangan sampai, era keterbukaan, era informasi digital, era kebebasan, era individualisme yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia makin menghancurkan jiwa dan semangat kepahlawanan. Sementara nilai-nilai baru yang sesuai dengan karakter bangsa belum ditemukan

Jangan tanyakan apa yang Bangsa ini bisa berikan kepada Anda. Tapi coba tanyakan apa yang Anda dapat berikan kepada Bangsa ini.

Ir Soekarno

dan terbentuk. Sehingga mulai nampak terjadi di kota kota besar hampir di seluruh tanah air hingga ke beberapa daerah pelosok negeri banyak generasi muda mengalami semacam dis-orientasi kebangsaan.

RELA BERKORBAN

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat bahwa untuk bisa menjadi bangsa yang besar sebagaimana bisa dilihat dan dirasakan layaknya sekarang ini, tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan dan perjuangan para pahlawan. Para pahlawan yang telah mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, keluarga, darah dan air mata bahkan hidupnya tanpa mengharapkan sesuatu untuk diri pribadi atau keluarganya. Betul betul "Sepi ing Pamrih" Tiada kepentingan pribadi. Semuanya itu hanya ditujukan demi eksistensi dan keluhuran bangsa dan negara Indonesia. Pengorbanan yang tidak bisa dinilai tersebut sampai-sampai istri, anak, keluarga, bah-

PAHLAWAN HARI INI

Waktu berjalan, jaman berubah, keadaan berganti, situasi berkembang, globalisasi merebak, individualisme menjadi epsresi pribadi, hak asasi jadi dasar perjuangan diri.... Ketika jaman kerajaan Mataram dulu, yang dihormati sebagai Pahlawan adalah tokoh yang Sepi ing pamrih tersebut. Nah..., pertanyaannya sekarang, Siapa tokoh yang rela berkorban untuk menjadi Pahlawan bagi bangsa dan negara Indonesia? Bukan Pahlawan kesiangan. Kalau yang ini sering muncul di media massa. Slogan bisnis saat ini adalah tidak ada makan siang gratis...*lunch free just in the mice trap*...makan siang



Prajurit TNI ikut menjadi guru di daerah pedalaman dan perbatasan Indonesia salah satu bentuk kepahlawanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara

gratis hanya ada di jebakan tikus. Sederhananya, saat ini telah terjadi perubahan tata kehidupan dan pergeseran tata nilai dalam seluruh aspek keidupan masyarakat dan bangsa.

Lalu siapa yang bertanggung jawab membangun jiwa kepahlawanan, semangat berjuang dan rela berkorban..? Seorang filosof dan ahli ketatanegaraan di era Kekhalifahan dari Timur Tengah, Ibnu Taimiya mengatakan: "*La mashlaha hajihil ummah illa ma shaluha awalaha*" (Umat ini tidak akan menjadi umat yang besar, kecuali bila umat ini mau mengamalkan hal-hal yang pernah membesarkan umat-umat terdahulu). Apa yang membesarkan umat atau bangsa terdahulu? Jawabnya adalah "Jiwa Kepahlawanan". Menata kembali kualitas moral dan etika. Sekali lagi penulis tekankan, "menata kembali kualitas moral dan etika". Dan lagi lagi "menata kembali kualitas moral dan etika". Kalimat pendek ini sangat mudah diungkapkan, namun betapa sulit dan berat serta untuk mengimplementasikannya.

PERGESERAN TATA NILAI KEHIDUPAN

Dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yang lebih

penting, bagi setiap warga negara dan anak negeri dari seluruh komponen bangsa adalah untuk dapat menilai diri sendiri, apakah sudah turut serta membina jiwa dan semangat cinta tanah air, persaudaraan, rela berkorban demi kesatuan dan persatuan bangsa sebagai wujud jiwa kepahlawanan. Perang tidak hanya bersifat konvensional, memanggul senjata menuju medan perang melawan musuh. Namun juga termasuk perang terhadap kerusakan-kerusakan dalam diri sendiri, kerusakan-kerusakan yang berasal dari dalam (entropi). Entah itu karena benturan budaya asing, pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari

luar, asimilasi pola kehidupan, banjirnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perilaku Masyarakat yang mengarah kepada perilaku liberal, individual, ego sentris, praktik tidak jujur, pengabaian penegakkan hukum dan lain sebagainya.

Menjadi tugas setiap warga negara dan pribadi anak bangsa saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran pribadi seiring perkembangan dan tuntutan keadaan. Menjadi guru atau pendidik yang rajin dan tekun, menjadi pedagang yang jujur, menjadi Ustaz yang memberikan kesejukan dan kedamaian, menjadi wartawan yang seimbang dalam pewartaan, dan seabreg profesi lain yang baik dan bertanggung jawab. Para Pahlawan saat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, telah memberikan dan mengorbankan segalanya. Jadi apabila saat sekarang seluruh anak negeri dalam memperingati Hari Pahlawan menundukkan kepala mendoakan para pahlawan, mengenang jasa-jasa dan pengorbanan mereka, diikuti kesediaan untuk menimba teladan hidup dari mereka seperti keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran.

kan seluruh anak negeri pun tidak mengenal jasadnya ketika meninggal dunia. Akhirnya dikenal sebagai “Pahlawan Tak Dikenal”

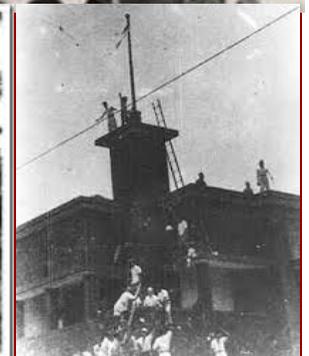
Hal diatas bisa dilihat, apabila mengunjungi Makam Pahlawan di seluruh wilayah tanah air, selalu ditemui nisan dengan tulisan “TAK DIKENAL”. Sampai saat ini secara literasi, bangsa Indonesia juga mencatat bahwa korban dari perjuangan merintis, merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara ini, belum ada angka atau jumlah yang pasti yang dapat menyebutkan siapa saja, berapa jumlahnya, dimana saja dan bagaimana korban perjuangan para pahlawan tersebut? Pahlawan yang berjuang dan berkorban mulai saat menentang penjajahan, pergerakan nasional, merintis kemerdekaan, dan mempertahankan proklamasi serta korban pada peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan dan selalu diperingati setiap tanggal 10 November pada setiap tahunnya, merupakan tokoh yang sepi *ing pamrih rame ing gawe*. Rela berkorban dengan tidak mengharapkan sesuatu.

Badan Keamanan Rakyat (BKR) atau yang kemudian dikenal dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang selanjutnya merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah masuk kategori maju saat didirikan belum bisa menyajikan angka pasti berkaitan dengan korban para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia. Misalnya peristiwa Oktober–November 1945 di Kota Surabaya tercatat sekitar 60 pasukan dan laskar yang didirikan oleh para pemuda atau karyawan berbagai profesi. Saat itu sudah terbentuk secara

sederhana BKR berupa pasukan Laut dan Udara. Tercatat yaitu pasukan BKR Laut/TKR Laut Tanjung Perak, dan Pasukan Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut, Sedangkan Pasukan BKR/TKR Udara di Morokrembangan.

Pasukan dan laskar bersenjata, diperkirakan sekitar 100.000 pemuda dengan bersenjatakan bambu runcing dan clurit untuk turut serta dalam pertempuran selama tiga hari. Sebagian besar dari mereka belum memiliki senjata, namun mempunyai tekad untuk merebut senjata dari tangan tentara Inggris. Di bagian sektor belakang, para wanita rela berkorban sebagai anggota Palang Merah dan juru masak di dapur umum yang didirikan untuk kepentingan para pejuang yang waktu itu dikenal sebagai Kaum Republik. Para pejuang dan sukarelawan tersebut bukan hanya penduduk Surabaya, melainkan berdatangan dari wilayah di sekitar Surabaya, seperti Gresik, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Bondowoso, Ponorogo bahkan dari Mojokerto, dan Malang. Korban yang gugur dari Kaum Republik pada peristiwa 10 November sekitar 6.000 pejuang. Dan sekitar 200.000 penduduk sipil mengungsi dari kota Surabaya. Karena banyaknya korban tersebut, akhirnya kota Surabaya dikenang sebagai Kota Pahlawan. Rakyat atau pemuda pada peperangan tersebut yang terbanyak adalah dari mereka yang sedang belajar di Pondok Pesantren atau disebut Santri. Oleh karenanya dalam peperangan ini tampil pemimpin santri yang kemudian sangat dikenal oleh bangsa Indonesia yaitu Bung Tomo.

10 NOVEMBER 1945



Gambar oleh: Google



SEPERTI KSATRIA

Pribadi atau individu seperti apa sebaiknya dalam kehidupan bermasyarakat dilihat dari filosofi kepahlawanan tersebut? Tentu banyak pilihan dan jawaban. Ada nasehat dari Chin Ning Chu ([*Chinese American Business Consultant*](#)) sebaiknya untuk menjadi ksatria, yaitu melihat kehidupan sebagai medan perang yang harus dihadapi Kesatria, dan kemenangan adalah satu-satunya tujuan.

Ksatria jenis ini bukanlah seperti yang dimengerti di Barat, para Kaum Kapitalis, Kaum Pasar Bebas, Kaum Liberalis yang membunuh kompetitor yang besar ataupun kecil, yang masih potensiil atau riil, laten atau terlihat. Bukan Kesatria sebagai “mesin pembunuh” semata. Disinilah diperlukan kesatria yang ada unsur batiniah atau rohani.

Beberapa kalimat kunci untuk mengawali perenungan atau refleksi diri :

Temukan keyakinan batin Anda.
Jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.
Jangan takut akan sukses ataupun takut akan gagal.
Tak ada yang salah di dunia ini, yang salah adalah persepsi Anda tentangnya.
Kuasailah perbedaan antara kebajikan dan kepura-puraan.
Jangan hanya berupaya menghindari kegagalan dan mengejar kesenangan
Sadarilah bahwa Sang Pencipta yang menghancurkan dan sekaligus menciptakan.



PENUTUP

Sebagai akhir tulisan ini, ada sepotong kisah antara petapa dan pelacur.

Alkisah seorang pertapa tinggal di asrama seberang jalan rumah bordil seorang pelacur. Keseharian sang petapa melakukan meditasi. Dan setiap hari juga melihat lelaki datang dan pergi ke dan dari rumah bordil tersebut. Petapa melihat pelacur menyambut dan mengantar tamu-tamunya. Dari hari ke hari pertapa itu membayangkan dan merenungkan apa yang diperbuat pelacur bersama tamunya dikamar. Hatinya dipenuhi kebencian, penilaian akan kebobrokan moral pelacur tersebut.

Disisi lain, keseharian pelacur itu melihat sang petapa melakukan meditasi spiritual dan sembahyang. Betapa indah dan demikian suci menggunakan waktu dalam doa dan meditasi. Terselip penyesalan, "Nasibku, ...memang menjadi pelacur. Ibuku juga pelacur, dan putriku (mungkin) menjadi pelacur juga. Barangkali memang demikianlah hukum negeri ini."

Kebetulan keduanya meninggal di hari yang sama dan berdiri bareng di depan Malaikat Pengadil. Di luar dugaan, sang pertapa dicela "Hidupmu salah!". Petapa tersebut protes, "Hidupku adalah hidup yang suci. Menghabiskan hari-hari untuk doa dan meditasi." "Betul", kata Malaikat, "Badanmu melakukan ibadah suci tapi, pikiran dan hatimu penuh oleh penilaian jahat, jiwamu dikotori bayangan penuh nafsu". Sebaliknya sang Pelacur dipuji. "Saya tidak mengerti," kata Pelacur, "Selama hidup, aku menjual tubuhku kepada lelaki yang memberikan harga pantas". Malaikat pun menjawab "Betul". "Kamu lahir dan besar di lingkungan rumah bordil serta menjadi pelacur. Semuanya di luar kemampuanmu. Meski badan melakukan kehinaan, pikiran, hati dan jiwamu senantiasa dalam kontemplasi doa, meditasi suci".

Pesan penutupnya, Jika seluruh lapisan masyarakat dan komponen bangsa, mau dan mampu menjadikan dirinya sebagai panutan atau suri tauladan kepahlawanan. **INDONESIA BISA!!!**

A spoon of salt in a glass of water makes the water undrinkable. A spoon of salt in a lake is almost unnoticed (Sesendok garam bisa membuat segelas air tidak bisa diminum, sesendok garam dalam sebuah danau hampir tidak berarti)

*So what do we have to do ?'cause It's a choice. (Lalu apa yang anda kerjakan? Silahkan pilih...)
It's up to you...! (Terserah Anda sendiri).*****

SELAMAT HARI PAHLAWAN

10 NOVEMBER 1945
10 NOVEMBER 2016



**SEMANGAT
KEPAHLAWANAN
ADALAH
JIWA RAGAKU**



“JENDERAL POLISI YANG SEDERHANA, DAN BERVISI LUAS”

Irjen. Pol. Drs. Bambang Hermanu, S.H., M.M
 Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas

Bumi Tambun Bungai adalah tempat terakhir Brigjen Pol. Drs. Bambang Hermanu, SH, MM bertugas, sebelum akhirnya melanjutkan tugasnya sebagai Pati Polri untuk penugasan pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas). Selanjutnya jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) diemban oleh mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Pol. Fakhrizal.

Penugasan Bambang di Setjen Wantannas sendiri adalah untuk menggantikan Irjen Pol. Drs. H.S. Maltha, SH, M.Si dalam rangka mutasi jabatan. Bambang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas pada Selasa, 30 Juni 2015 oleh Letjen TNI Waris, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada waktu itu. Dasar pelantikannya adalah Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88/M Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015. Berlaku sebagai saksi adalah Mayjen TNI Nana Rohana, SE (Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan) dan Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH (Deputi Bidang Politik dan Strategi).

Setelah lulus Sekolah Menengah Atas pada 1979, Bambang langsung melanjutkan pendidikan ke AKABRI di Magelang dan lulus pada 1983. Pada waktu itu Bambang sempat masuk dalam *The Best Thirty* (30 lulusan terbaik). Kemudian masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) selama 3 tahun. Penempatan perwira pertama Bambang adalah di Jakarta dan seluruh wilayah Jakarta sudah dijamahnya.

Ada cerita yang menarik dari perjalanan

karir Bambang. Pada 1992, ketika ia dimutasi ke Kasat Gaops Puskodal Ops Polda Metro Jaya, ia mendapat kesempatan untuk pertama kalinya tugas ke luar negeri (Kamboja) dalam rangka mengemban misi Garuda 12. Saat itu ia baru berpangkat Kapten, tapi ditunjuk sebagai Kapolda. Hal ini dikarenakan Bambang fasih dalam berbahasa Inggris dan Kamboja juga mampu melakukan pendekatan dengan rakyat Kamboja. Selain itu, ia juga menyambangi negeri *Uncle Sam* guna menuntut ilmu di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat pada Februari 2004.

Cerita lain dari perjalanan karir Bambang adalah pada 1998 pernah bertugas di Timor Timur sebagai Kapolres Ailiu. Sedikit membuka sejarah, Timor Leste atau yang dulu kita sebut Timor Timur adalah propinsi ke-27 di masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan pada saat itu sedang terjadi jajak pendapat masyarakat Timor Timur tentang pilihan untuk menerima otonomi khusus atau berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu ia mendapat tugas mengkoordinir *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET). Tapi itu pun tidak sepenuhnya dilakukan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya mengirim utusan untuk peralihan proses jajak pendapat disitu. Bambang mendapat tugas untuk mengamankan utusan PBB disana. Jika terjadi ada korban meninggal, maka ia akan dituntut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena kepiawaiannya, bapak dengan dua orang cucu ini berhasil mengamankan jalannya proses jajak pendapat.

Awal bertugas di Setjen Wantannas, Bambang mengaku sudah mengenal Wantannas sebelumnya dari kolega-koleganya yang pernah bertugas di Wantannas juga. Sebagai Staf Ahli, tugas utama Bambang adalah membantu Sesjen

Wantannas dalam bidang Ekonomi dan menjalankan program kerja seperti yang telah dituangkan di dalam rencana kerja seperti membuat Perkiraan Cepat (Kirpat), mengikuti kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka), Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), dan lain-lain.

Pria yang hobi olahraga tenis dan golf ini selalu memperhatikan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur sesuai dengan kemampuan yang ada. dimana saja dia bertugas. Sebagai contoh: di Kalimantan dulu belum ada Sekolah Polisi Negara (SPN). Kalaupun ada, sifatnya adalah dipinjami oleh Pemerintah Daerah yang sarannya sangat terbatas. Akhirnya ia putuskan untuk membangun SPN lengkap dengan aula dan masjid dengan bantuan hibah dari beberapa pengusaha di sana.

Dalam wawancara bersama Tim Majalah Catra, Bambang mengemukakan pendapatnya tentang institusi Polri khususnya mengenai berita-berita miring yang banyak ditayangkan oleh media.

“Akan selalu ada berita miring terus selama kita bergaul dengan masyarakat yang punya persepsi masing-masing, dan Polri cenderung melanggar HAM karena harus mengambil orang yang bersalah. Pasti ada dua sisi. Walaupun kita sudah berbuat baik. Nah, tugas kita hanya mengeliminir pendapat-pendapat itu dan mengurangi suara-suara negatif dengan kinerja yang bagus, artinya kita harus lebih transparan. Polisi itu ibarat toilet. Tidak akan dicari kalau tidak dibutuhkan,” jelas Bambang.

Seperti sudah dijelaskan diawal, tugas Staf Ahli adalah membantu Sesjen Wantannas dalam penyusunan produk berupa naskah atau kajian yang nantinya akan direkomendasikan kepada Presiden RI. Bambang menilai apa yang dikerjakan Wantannas sesungguhnya sudah baik.

“Produk kita sebenarnya sudah berkualitas dan berbobot. Yang masih jadi pertanyaan adalah sampai dimana produk-produk yang kita kirim. Apakah sudah sampai dibaca oleh Presiden atau belum. Kita masih belum tahu mana-mana saran yang dipakai oleh Presiden,” tegas Bambang.

Bambang menilai masih kurangnya perhatian Presiden terhadap Wantannas. Sudah seharusnya Presiden mengenal apa itu Wantannas. Mungkin harus ada *statement* tentang apa yang diinginkan Presiden, sehingga dalam membuat kajian dan program kerja tidak perlu meraba-raba.

Di akhir wawancara, Bambang mengutarakan pesannya untuk segenap personil Setjen Wantannas.

DATA DIRI

- NAMA : Bambang Hermanu
- PANGKAT/CORPS : Inspektur Jenderal Polisi
- JABATAN : Staf Ahli Bidang Ekonomi
- KESATUAN : Dewan Ketahanan Nasional
- TMTPOLRI : 1 Februari 1983
- TTL : Klaten, 4 Desember 1959
- SUKU BANGSA : Jawa
- AGAMA : Islam
- PENDIDIKAN : Strata 2 Magister Manajemen Tahun 2002
- JUMLAH ANAK : 3 (tiga) orang

KECAKAPAN BAHASA :

- INGGRIS : Aktif
- KHMER : Pasif

PENUGASAN LUAR NEGERI:

- Kamboja Tahun 1991
- Amerika Serikat 2004

RIWAYAT JABATAN :

- Kapolsek Metro Tebet Polres Jaksel
- Kapolsek Metro Setiabudi Polres Jaksel
- Waka Polres Bekasi
- Pamen Polda Metro Jaya
- Kapolrs Ailiu Polda Timor Timur
- Kapolres Blora Polwil Pati Polda Jateng
- Kapolres Cilacap Polwil Banyumas Polda Jateng
- Kapolresta Surakarta Polwil Surakarta Polda Jateng
- Wadir Reskrim Polda Sulsel
- Dir Reskrim Polda Maluku
- Kapolres Metro Jakpus
- Widyaiswara Muda Sespim Polri
- Pamen Sespim Polri
- Kadep Jemen Dit Akademik Sespim Polri
- Kakorsis Sespim Polri
- Wakapolda Riau
- Irbid Jemen Sdm I Itwil I Itwasum Polri
- Irbid Jemen Sdm I Itwil I Itwasum Polri
- Irwil I Itwasum Polri
- Kapolda Kalteng
- Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas

“Hidup cuma satu kali. Yang utama kita harus berbuat yang terbaik untuk sesama

Derbanyak silaturahmi, ibadah, dan jaga kesehatan”

PEMERINTAH BENTUK TIM



SABER PUNGLI

Oleh: Desi Fajar Nita

Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Presiden Jakarta, Jumat (21/10) menjelaskan setelah sebelumnya pemerintah memfokuskan diri pada penguatan pondasi ekonomi, saat ini pemerintah tengah mereformasi bidang hukum di Indonesia. Reformasi hukum yang hendak dilakukan oleh pemerintah menurut Wiranto terbagi dalam tiga ruang lingkup diantaranya adalah penataan regulasi.

"Mengapa? Karena di sana banyak regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak efisien, regulasi yang justru tidak menguntungkan dari sisi penegakan hukum. Yang kedua pembenahan lembaga dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pembenahan ini, pemerintah menasar pada lembaga maupun aparat yang secara nyata tidak menjalankan tugasnya dengan proporsional dan profesional. Yang ketiga adalah membangun budaya hukum di kalangan masyarakat," kata Wiranto.

Dalam arahnya, lanjut Wiranto, Presiden menitikberatkan reformasi hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena sifatnya yang penting dan sangat merisaukan. Karenanya, dalam tahap pertama ini, pemerintah kemudian memfokuskan diri pada lima perkara hukum.

"Dari pertimbangan itu maka reformasi hukum tahap pertama ada lima. Yang pertama pemberantasan pungutan liar. Pemberantasan penyelundupan. Lalu percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB. Kemudian relokasi lapas yang telah over-capacity. Dan perbaikan layanan hak paten merk dan desain," imbuhnya.

Khusus untuk pemberantasan pungli, lanjut Wiranto, Pemerintah sangat serius menangani ini karena ada tanggapan publik yang sangat luas. Wiranto juga mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia. Karena tim saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat.

"Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan," jelas Wiranto.

Pemerintah, tambah Wiranto, telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui laman saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Tim Saber Pungli dalam operasinya dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Wiranto, membawahi jajaran dibawahnya sebagai pelaksana lapangan yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim ini dipastikan akan mengawal pemberantasan pungli, baik di pusat maupun daerah.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bondan mengapresiasi pembentukan Tim Saber Pungli oleh Presiden. Namun menurut Ganjar, Presiden seharusnya lebih memaksimalkan kerja dari aparat penegak hukum ketimbang membuat sebuah tim satgas.

"Pungli itu adalah kejahatan korupsi. Jadi kejahatan yang sebetulnya kalau secara hukum sudah ada institusi yang berwenang melakukan penindakan. Kita mengapresiasi Presiden memberikan perhatian khusus kepada pungli. Tapi membentuk satuan khusus menurut saya itu langkah yang tidak efektif. Karena sebagai sebuah kejahatan, dia sudah bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang sudah ada," kata Ganjar Laksmana Bondan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya di Kantor Presiden Jumat (21/10) menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (BPKP, 2002:6).

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang

kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi

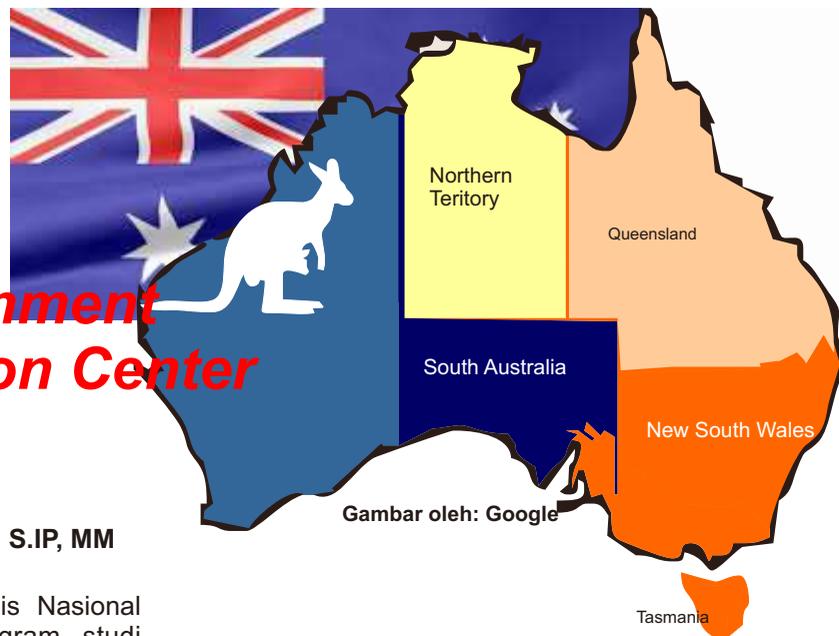
FAKTOR PENYEBAB PUNGUTAN LIAR

- **Penyalahgunaan wewenang.** Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar
- **Faktor mental.** Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- **Faktor ekonomi.** Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- **Faktor kultural & Budaya Organisasi.** Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- **Terbatasnya sumber daya manusia.**
- **Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.**



Gambar oleh: Google

STUDI BANDING TIM PPKN Australian Government Crisis Coordination Center (AGCCC)



Oleh: Brigjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM

Tim Pusat Pengendalian Krisis Nasional (PPKN) melaksanakan program studi banding ke Australia dari tanggal 17 s.d 21 Oktober 2016, selama di Australia Tim PPKN mendatangi beberapa Lembaga atau instansi-instansi yang menjadi objek peninjauan tersebut meliputi: (1) *The Australian Government Crisis Coordination Centre (AGCCC)* yang merupakan bagian dari the Attorney General Department of Australia di Canberra; (2) *The Australian Federal Police Operation Coordination Centre* di Canberra; (3) *The Queensland Police Operation Centre* di Brisbane; (4) *The Queensland State Disaster Coordination Centre* di Brisbane; dan (5) *The New South Wales Transport Management Centre* di Sydney.

Pada kunjungan tersebut tim PPKN yang terdiri dari:

1. Laksda TNI Dr. H. Sipahutar, M.Sc ,Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam
2. Marsda TNI Suwandi Miharja, M.D.S., Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Kemenko Polhukam
3. Brigjen TNI Toto Siswanto, S.Ip, M.M ,Bandep Lingstrareg Dejiandra Setjen Wantannas RI
4. Kolonel Pnb Ahmad Sajili, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan pada Kedeputan IV / Haneg Kemenko Polhukam
5. Kolonel Tek Dr Sigit Priyono, GSC, S.IP, M.Sc, Kepala Bidang Pertahanan dan Politik ASEAN pada Asdep 3/II Polugri, Kemenko Polhukam
6. Kolonel Inf Rudy Syamsir, S.H., Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan pada Asdep 3/ IV Haneg, Kemenko Polhukam.

Program studi banding tersebut di atas sangat bermanfaat karena melalui kegiatan ini telah diperoleh sejumlah informasi dan masukan yang cukup komprehensif tentang berbagai aspek dari beberapa organisasi terkait di lingkungan Pemerin-

tah Australia. Informasi dan masukan dari sumber utama ini sangat diperlukan dalam rangka Pemerintah Indonesia sedang memproses pembentukan PPKN. Disamping proses pembentukan PPKN telah melibatkan Kementerian dan lembaga terkait di Indonesia guna mendapatkan berbagai masukan, hasil kunjungan Tim studi banding ini juga bias digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan, karena terdapat sejumlah kesamaan maupun perbedaan antara sistem yang sudah operasional di Australia dengan konsep PPKN.

Sistem yang digunakan oleh Pemerintah Australia dalam pengelolaan krisis tentu tidak dapat sepenuhnya bias diterapkan pada sistem yang akan digunakan sehubungan pembentukan PPKN ini. Namun dalam beberapa aspek yang meliputi: legalitas, visi dan misi, hubungan antar kelembagaan, manajemen personal, infrastruktur (sarana prasarana), tata kelola penganggaran dan aspek lain, diperoleh sejumlah lessons learned yang bias digunakan sebagai referensi.

Sistem pengelolaan atau pengendalian suatu keadaan krisis tentunya berhubungan dengan ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh suatu negara. Secara umum, ancaman dan tantangan yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi oleh pemerintah Australia antara lain meliputi terorisme dan bencana alam. Kedua prioritas permasalahan ini, disamping juga tantangan lain seperti yang termasuk dalam trans national crimes, dinilai bias bereskalasi dari awalnya sebagai krisis tingkat Negara bagian (*state*) menjadi krisis tingkat nasional.

Pada dasarnya, pengelolaan krisis di tingkat Negara bagian dan di tingkat nasional yang dilakukan oleh pemerintah Australia relative sama dengan apa yang berlaku di Indonesia dan dengan apa yang sudah

dikonsepsikan dalam pembentukan PPKN. Hirarki perundang-undangan mulai dari tingkat konstitusi sampai peraturan-peraturan di bawahnya secara prinsip bisa dikatakan terdapat beberapa kesamaan. Demikian pula terdapat kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola bidang-bidang tertentu. Bahwa pada tataran tertentu, dijumpai kesamaan tentang adanya permasalahan terkait ego sektoral dalam penanganan permasalahan yang dihadapi pemerintah Australia. Namun demikian, dengan sistem yang dijalankan permasalahan terkait ego sektoral sejauh ini dapat diminimalisir.

Beberapa informasi penting yang diperoleh selama kunjungan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum / Perundang-undangan

Di Negara manapun, aspek hukum menjadi salah satu faktor utama bagi keberadaan suatu organisasi baik pemerintahan maupun swasta, karena jika tidak terpenuhinya aspek ini, maka suatu organisasi akan ilegal, apapun yang dilakukan dan dihasilkan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal pembentukan AGCCC, diperoleh pelajaran bahwa ada semacam "kemudahan" pada aspek legal ini. Kebijakan di tingkat kementerian atau bentuk-bentuk kesepakatan seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) antar kementerian cukup menjadi dasar hukumnya. Hal ini dapat dianalisa bahwa karena memang tugas pokok dan fungsi dari AGCCC adalah pada tataran koordinasi, yaitu mengkoordinir dan memberikan dukungan informasi yang telah dianalisis kepada lembaga / agensi terkait dalam penanganan krisis nasional. Disamping itu, karena AGCCC merupakan bagian dari *The Attorney General Department* (Kementerian Kehakiman). Sebagai perbandingannya, konsep PPKN yang merupakan lembaga ad hoc, dan masih di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, akan menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres).

2 Aspek hubungan antar kelembagaan

Pada situasi normal, terlebih pada situasi krisis, tata laksana hubungan antar lembaga ini didukung oleh adanya penugasan perwira penghubung (*Liasion Officer*). Para LO berperan cukup penting dalam mengkomunikasikan terkait peran yang dilakukan masing-masing lembaga yang diwakilinya dan peran yang akan dimainkan secara terintegrasi pada saat situasi krisis sudah berkembang ke skala nasional. Bahkan pada tataran tertentu, LO dapat memberikan kontribusinya tanpa harus menunggu arahan dari pimpinannya dalam rangka proses penanganan krisis, kecuali untuk hal yang bersifat prinsipil / krusial.

Diperoleh gambaran juga bahwa dengan konstitusi yang berlaku di Australia, pembagian kewenangan yang jelas dan tegas, sejauh ini dapat diterapkan dengan baik. Dalam penanganan suatu situasi krisis, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh pengendalian. Bahkan pada situasi krisis berskala nasional, meskipun suatu daerah (state) mendapatkan berbagai dukungan dari pusat, namun

komando pengendaliannya tetap berada di pemerintah daerah.

Diantara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan krisis baik di tingkat daerah maupun nasional, Polisi Federal Australia (FPA) merupakan institusi yang memainkan peran menonjol. Sebaliknya, sesuai konstitusi yang berlaku militer Australia yang juga memiliki kemampuan baik personil maupun alutsista, tidak dapat memainkan peran yang besar di luar tugas pokok dan fungsinya yaitu pertahanan. Sehingga dalam situasi krisis sebagaimana dimaksud di atas, kontribusi militer lebih kepada penggunaan asset yang sesuai dan dibutuhkan oleh pemerintah daerah atau lembaga lain.

3. Aspek infrastruktur (sarana prasarana)

Pada aspek infrastruktur ini, Australia memiliki kemampuan yang sangat memadai. Kemajuan pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sangat membantu efektifitas dan efisiensi penanganan krisis baik ketika masih berada pada tingkat daerah atau setelah beres kalasi menjadi tingkat nasional. Kelengkapan system pada bidang TIK ini dapat terwujud tentunya karena ditunjang oleh penganggaran yang sangat memadai. Jaringan informasi yang sudah tergelar secara on line, dan menyeluruh pada lembaga-lembaga terkait penanggulangan krisis, tentu lebih memungkinkan diperolehnya kecepatan, efektifitas dan efisiensi dalam penanggulangan krisis.

Infrastruktur, terutama pada sektor sistem informasi, menuntut kesiapan dari alat peralatan. Dalam hal ini, diperoleh gambaran bahwa, ada pembagian tugas yang jelas antara pengguna dan tenaga yang khusus menangani pemeliharaan dan perawatan system informasi. Dengan demikian, system akan selalu lebih siap untuk digunakan baik pada situasi normal keseharian, maupun pada saat menanggulangi krisis.

4. Aspek manajemen personil (SDM)

Pengawasan organisasi di AGCCC dilakukan dengan pengisian personil secara tetap dalam pengertian bahwa personil di unit AGCCC adalah para pegawai dari Kementerian Kehakiman (*the Attorney General Department*). Sedangkan personil dari kementerian atau lembaga terkait lainnya, adalah para perwira penghubung (*liaison officer*). Dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil dilakukan sejumlah program pendidikan dan latihan

Pada kementerian/lembaga sudah terdapat fasilitas diklat dan kelengkapannya yang sangat memadai, serta didukung tenaga pengajar/pelatih baik berasal dari kementerian/lembaga bersangkutan atau bias didatangkan dari institusi lain. Program pendidikan dan latihan ini juga dilaksanakan dalam mendukung kesiapan pelaksanaan tugas ketika sudah bekerja secara terintegrasi saat penanggulangan suatukrisis. Selain menggunakan sumberdaya manusia (para pegawai) dari kementerian, dilibatkan juga para tenaga ahli dari bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan.****

Setjen Wantannas Selenggarakan Bakohumas Bahas Penyelamatan Generasi Muda dari Narkoba

Oleh: Enang Suhendar, A.Md



Sahli Bid. Hankam Mayjen TNI Nana Rohana, SE memberikan kata sambutan pada acara pertemuan Forum Bakohumas

“Maksud dan tujuan kegiatan forum bakohumas adalah sebagai sarana meningkatkan peran kehumasan Setjen Wantannas bersama anggota kehumasan Kementerian/Lembaga dalam mendukung dan mempublikasikan program, rencana, dan capaian kerja pemerintah yang pada gilirannya dapat membangun opini dan citra positif pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”Demikian disampaikan Kepala Biro Persidangan dan Humas, Brigjen TNI Firman Achmadi, SE selaku Ketua Pelaksana Bakohumas dalam menyampaikan laporannya pada acara pertemuan tematik Bakohumas (26/10/2016).

Kegiatan yang bertempat di Aula R.A Kartini, Lt.11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut mengusung tema Penyelamatan Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Setjen Wantannas bekerjasama dengan sekretariat Bakohumas Pusat. Hadir memberikan sambutan, Sesjen Wantannas yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Hankam, Mayjen TNI Nana Rohana, SE dan Dirjen IKP Kemenkominfo yang diwakili oleh Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Siti Maeningsih, M.Si. Kegiatan tersebut juga dihadiri para pejabat Setjen Wantannas, para Staf Humas di setiap K/L dan undangan lainnya.

Selanjutnya Staf Ahli Bidang Hankam, Mayjen TNI Nana Rohana, SE dalam mengawali sambutannya menyampaikan bahwa ketika Presiden Joko Widodo

menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Nasional menyampaikan bahwa jumlah pengguna narkoba terus meningkat, angka prevalansi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penggunaan narkoba mencapai sekitar 40 sampai 50 orang, ditambah kerugian material yang diperkirakan sejumlah Rp. 63 Triliun. Staf Ahli Hankam melanjutkan “Perlu tindakan-tindakan konkrit dan nyata. Presiden menginstruksikan kepada seluruh K/L, LSM, dan masyarakat untuk bersinergi dan melakukan langkah-langkah terpadu dan progresif untuk melawan narkoba.” Masih dalam sambutannya, Staf Ahli Hankam menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah dengan tegas memerintahkan kepada seluruh sumberdaya pemerintah untuk hadir dan memberantas narkoba.

Kemudian Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Siti Maeningsih, M.Si mengatakan bahwa narkoba adalah ancaman serius bagi generasi remaja. “Dari total pengguna narkoba sejumlah 5,1 juta orang, 30 persen-nya adalah generasi muda” paparnya. Masih dalam sambutannya, Siti Maeningsih mengharapkan Staf Humas di setiap K/L untuk secara simultan dan intensif mendiseminasikan capaian pemerintah selama 2 tahun. Sebab Humas adalah mata, telinga, dan suara dari organisasi. Sudah seharusnya Humas menjadi garda paling depan untuk menjembatani komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat guna tercipta hubungan yang harmonis.

Memasuki sesi pemaparan materi, Ir. Muhammad Iqbal, M.Sc menyampaikan bahwa narkoba bukan hanya sebagai nasional concern tapi sudah jadi global problem. “Meskipun kita telah memiliki UU No. 35 tahun 2009 tetapi kasus narkoba cenderung meningkat” paparnya. Terdapat beberapa identifikasi masalah narkoba yaitu kapasitas SDM terkait penguasaan materi pencegahan narkoba masih terbatas (profesionalisme, integritas moral, dan komitmen) berikut rasio jumlah aparat dengan wilayah dan populasi dan gaya hidup generasi muda yang serba instant dan hedonis serta daya tarik bisnis narkoba yang bernilai tinggi serta kuatnya sindikat narkoba internasional yang terstruktur, sistematis, dan masif. Iqbal menerangkan bahwa posisi geografis negara Indonesia yang cukup luas dan terbuka dari segala arah serta kondisi demografis yang besar merupakan pasar potensial narkoba. Setelah sesi pemaparan selesai, dibuka sesi tanya jawab dan diskusi yang dipandu oleh moderator Kolonel Inf Frans Thomas. Peserta Bakohumas cukup antusias dalam menyampaikan pertanyaan dan masukannya, salah satunya yaitu Toni Saiful dari Bakamla yang menyampaikan bahwa kasus narkoba yang terungkap cenderung disandingkan dengan jumlah uang yang beredar, bukan disandingkan dengan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tergiur dengan bisnis narkoba. Beberapa pertanyaan yang disampaikan dapat direspon dengan baik oleh narasumber sampai dengan selesainya acara.****



PEDAGANG TAHU BANGKITKAN MASYARAKAT DENGAN BUKU

Rudiat alias Mang Yayat menerima penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional

Oleh: Desi Fajar Nita

Keterbatasan bukan alasan untuk tidak berbagi dan berbagi tidak harus menunggu serba ada. Demikian motto hidup seorang penjual tahu keliling bernama Rudiat saat ditemui Tim Majalah Catra di Bandung, Jawa Barat. Rudiat yang akrab disapa “Mang Yayat” berjualan tahu sejak usia 20 tahun. Namun, ia sempat beralih profesi dan bekerja pada sebuah konveksi rumahan. Untuk menopang perekonomian keluarga, pesanan kue kering dan kue-kue untuk hantaran pernikahan pun diterimanya juga. Pada 2010 Mang Yayat kembali berjualan tahu keliling.

Ada keunikan tersendiri dari bapak dengan tiga orang anak ini. Sambil keliling jualan tahu dengan harga mulai dari Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- per bungkus, tidak pernah lupa ia membawa beragam buku untuk dibaca dan dipinjamkan kepada masyarakat secara gratis. Dengan semangat literasinya, Mang Yayat giat mengajak masyarakat untuk gemar membaca.

Hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 4 Sekolah Dasar tidak membuatnya merasa rendah diri. Keinginan Mang Yayat untuk selalu belajar dan menimba ilmu ia wujudkan dengan mendirikan taman bacaan pada 1997. Ia pun merelakan rumah satu-satunya yang berukuran 5 x 8 meter dan berada di Jalan Gunung Puntang Kampung Pasirhuni RT 05 RW 06 Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dijadikan sebagai taman bacaan bagi warga sekitar.

Buku adalah jendela dunia. Semakin kita

banyak membaca, semakin luas pula kita mengenal dunia. Demikianlah keyakinan Mang Yayat. Taman bacaan miliknya dinamakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sehati yang pada waktu itu hanya mempunyai tiga buah buku saja. Taman bacaan ini berukuran 4 x 4 meter dan berada di ruang tengah dari rumah Mang Yayat. Tidak ketinggalan ruang teras depan dengan ukuran 2 x 4 meter pun ia sulap untuk kegiatan yang sama. Tujuan dari mendirikan TBM ini adalah agar masyarakat yang putus sekolah dan tidak mampu seperti dirinya bisa menimba ilmu secara gratis di sana.

Untuk menambah koleksi buku di taman bacaannya, Mang Yayat rela menyisihkan dana sebesar 2,5 % dari hasil keuntungan penjualan tahu atau dari sisa uang belanja istrinya. Dana yang terbatas bukanlah kendala. Ia kerap membeli buku-buku bekas yang masih layak baca dari tukang rongsokan. Sekarang koleksi buku di TBM Sehati sudah mencapai 4500-an buku yang berasal dari berbagai sumber mulai dari dana pribadi, sumbangan dari kementerian sampai dengan sumbangan dari masyarakat yang peduli dengan gerakan membaca dan menulis (literasi).

Pada 2013, TBM Sehati resmi berdiri karena sudah mendapat ijin operasional dari pemerintah. Pengelolaannya sendiri tidak lepas dari dukungan istri dan ketiga orang anaknya. Bersamaan mereka bahu membahu membawa misi Gerakan Literasi seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di berbagai daerah.



Widya literasi dan studi lingkungan di Kampung Wangsan, Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Berkat kegigihan pria yang hobi membaca dan nonton ini dalam menggalakkan semangat literasi di masyarakat pedesaan, akhirnya banyak yang peduli terhadap perjuangannya, termasuk pemerintah. Kini warga sekitar dan para sukarelawan banyak yang ikut membantu mengelola TBM Sehati. Sebagai contoh pada 2014 ada relawan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang rutin dalam memberikan bantuan manajemennya. Ada juga dari Universitas Pasundan (UNPAS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Apresiasi dari pemerintah pun mulai berdatangan. Tidak tanggung-tanggung, tiga penghargaan langsung diperoleh pria yang ramah dan baik hati ini, seperti tercantum di dalam data diri. Dipercaya sebagai narasumber merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan sebagai anak bangsa yang berprestasi. Bukti nyatanya adalah pada Hari Aksara Internasional 2013 dan 2014 diundang sebagai narasumber oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta diundang dalam acara *launching* buku *Gerilya Literasi* di Rumah Dunia, Serang, Banten, Jawa Barat juga pada 2014.

Media cetak dan elektronik berskala lokal dan nasional pun berlomba-lomba memuat berita tentang Mang Yayat dan segala aktivitasnya.

*Membaca mengubah hidup
Menulis untuk keabadian*

Apa yang dilakukan oleh Mang Yayat dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Kelihatannya memang sederhana. Namun, apapun bentuknya, berbagi ilmu akan menghasilkan tunas-tunas baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan hal itu akan terus bergulir kepada generasi yang akan datang. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai positif dari cerita ini. ****

DATA DIRI

- ✓ **Nama** : RUDIAT
- ✓ **TTL** : 15 Maret 1978
- ✓ **Pekerjaan** : Pedagang Tahu
- ✓ **Pendidikan** : Sekolah Dasar
- ✓ **Alamat** : Jalan Gunung Puntang Kampung Pasirhuni RT 05 RW 06, Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Jawa Barat
- ✓ **Status** : Menikah
- ✓ **Nama Istri** : Ratna Suminar
- ✓ **Jumlah Anak** : 3 (tiga) orang
- ✓ **Penghargaan** :
 - ✓ **Nugra Jasadarma Pustaloka Tahun 2013** dari Perpustakaan Nasional.
Kategori: Dedikasi Masyarakat yang Mengembangkan Perpustakaan.
 - ✓ **Sabilulungan Award Tahun 2013** dari Bupati Kabupaten Bandung.
Kategori: Perintis Perpustakaan Keliling di Wilayah Kabupaten Bandung.
 - ✓ **Sabilulungan Award Tahun 2014** dari Bupati Kabupaten Bandung.
Kategori: Rumah Kreatif
- ✓ **Aktivitas lain** :
 - ✓ **Memberikan bimbingan menulis jurnalis kepada siswa sekolah.**
 - ✓ **Memberikan santunan kepada anak yatim yang berprestasi.**



Rumah Mang Yayat yang dijadikan sebagai taman bacaan

KETAHANAN PANGAN

Pelajaran Masa Lalu untuk Masa Sekarang dan Akan Datang



Oleh: Muhammad Iqbal

Pangan adalah kebutuhan pokok (primer) manusia. Secara substansial, manusia akan bertahan hidup jika pangan tersedia dan sebaliknya manusia akan mati apabila pangan tidak ada. Di antara fenomena hidup dan mati tersebut, manusia akan mengalami instabilitas apabila terjadi kekurangan pangan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan fondasi dan sekaligus sendi fitrah kelangsungan hidup manusia di dunia.

Secara semantik, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik diolah maupun tidak diolah menjadi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Dengan demikian, ada aktivitas dalam penyediaan pangan, dimana prosesnya berhubungan dengan situasi dan kondisi alam seperti iklim dan cuaca serta unsur terkait lainnya. Upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan telah, sedang, dan akan terus berlangsung sepanjang peradaban kehidupan manusia. Dari beberapa upaya yang ada, dua di antaranya patut kita jadikan bahan pelajaran (lessons learned), yaitu pengalaman Nabi Yusuf dan Sultan Agung.

NABI YUSUF

Nabi Yusuf adalah salah satu utusan Tuhan yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Pangan (1745-1635 SM) di bawah Raja Kiftir dari Kerajaan Mesir. Pengangkatan Nabi Yusuf sebagai Menteri Urusan Pangan berawal dari penafsiran dia terhadap mimpi raja sebagaimana

tercantum dalam Al Quran tentang “tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi kurus dan tujuh tangkai gandum yang hijau serta tujuh tangkai gandum yang kering (QS Yusuf 12: 43)”.

Jawaban terhadap mimpi raja di atas terdapat pada tiga ayat berikutnya dalam Al Quran. Isinya masing-masing sebagai berikut:

1. “Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan” (QS Yusuf 12: 47).
2. “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan” (QS Yusuf 12: 48).
3. “Kemudian setelah itu akan datang tahun (1) yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur” (QS Yusuf 12: 49).

Paling tidak ada tiga implementasi kebijakan mendasar yang dilakukan oleh Nabi Yusuf selaku Menteri Urusan Pangan terkait dengan isu ketahanan pangan pada waktu itu. Ketiga kebijakan tersebut adalah:

1. Memerintahkan kepada seluruh rakyat Mesir untuk mengoptimalkan sumber daya lahan yang ada dengan dukungan fasilitas irigasi berikut peningkatan indeks pertanaman dalam rangka memacu hasil panen (produksi).
2. Membangun cadangan pangan melalui

pengembangan lumbung-lumbung pangan di semua wilayah, dimana rakyat diwajibkan untuk menyimpan setengah dari hasil produksi pertanian mereka pada lumbung-lumbung pangan di bawah pengawasan dan koordinasi langsung Menteri.

3. Mengatur dan mengawasi distribusi cadangan pangan pada kondisi rawan pangan akibat paceklik musim kemarau yang berkepanjangan (tujuh tahun).

Hasil nyata dari kebijakan ketahanan pangan Nabi Yusuf adalah terciptanya stabilitas (tidak ada konflik sosial dan gangguan keamanan). Minimal ada empat prinsip pokok ketahanan pangan gagasan Nabi Yusuf yang notabene hingga sekarang dan pada waktu mendatang masih tetap relevan untuk diimplementasikan, yaitu:

1. Optimalisasi seluruh potensi lahan yang ada untuk menghasilkan pangan bagi kebutuhan manusia.
2. Manajemen logistik dengan memperbanyak cadangan pangan pada waktu produksi melimpah dan mendistribusikannya secara selektif di kala ketersediaan pangan masyarakat mulai berkurang.
3. Mitigasi bencana kerawanan pangan dengan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana kelaparan atau kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan.
4. Deteksi dini dan prediksi anomali iklim serta cuaca melalui analisis fenomena perubahan alam.

SULTAN AGUNG

Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma adalah Raja Mataram yang memerintah dari tahun 1613 hingga tahun 1645. Beliau adalah raja yang amat peduli (high concern) terhadap penyediaan pangan, khususnya beras. Boleh dikatakan bahwa Sultan Agung merupakan raja yang cukup “fanatik” dibandingkan raja-raja lainnya di Nusantara terhadap komoditas beras.

Di masa pemerintahannya, Sultan Agung tidak hanya menjadikan beras untuk memakmurkan rakyat tetapi juga dimanfaatkan sekaligus guna memperluas pengaruh dan wilayah kerajaan.

Dengan tujuan agar Mataram “surplus” beras, Sultan Agung menerapkan program dan rekayasa sosial melalui intensifikasi tanaman padi mulai dari pengolahan lahan, tanam, pemeliharaan, hingga panen dan pascapanen. Tidak kalah pentingnya, kearifan lokal “pranata mangsa” atau pembagian periode musim tanam juga diterapkan pada waktu itu.

Satu peristiwa yang cukup fenomenal pada waktu itu adalah serangan terhadap VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di Batavia. Sultan Agung memperketat pelaksanaan intensifikasi padi, khususnya di jalur pantai utara (pantura), di bawah komando Tumenggung Bahureksa (Bupati Tegal). Sayangnya serangan tersebut kurang berhasil karena taktik yang diterapkan oleh tentara Belanda adalah dengan menghancurkan areal tanaman padi, saluran irigasi, dan lumbung-lumbung pangan yang tidak dijaga secara ketat karena prajurit Mataram lebih fokus terhadap penyerangan ke Batavia.

Sultan Agung menyadari bahwa kegagalan dalam perang melawan VOC bukan semata-mata karena kalah melawan kekuatan tentara dan kecanggihan senjata Belanda, tetapi lebih disebabkan kalah melawan kelaparan dan penyakit. Belajar dari semua itu, Sultan Agung menyusun kekuatan baru dengan memperbaiki parasarana dan sarana pertanian yang rusak dengan tujuan untuk menghalau penjajah dari tanah air. Tetapi sayangnya impian beliau tidak terwujud karena wafat.

Kurang berhasilnya serangan ke Mataram ke Batavia lebih disebabkan oleh kegagalan kebijakan domestik Kerajaan Mataram. Dua di antaranya yang cukup fundamental yaitu: (1) tidak optimalnya pemanfaatan tenaga kerja wanita dalam bidang pertanian untuk menggantikan (substitusi) tenaga kerja pria yang banyak meninggalkan lokasi untuk ikut berperang, karena cukup kuatnya tradisi pada waktu itu yang menempatkan kaum wanita lebih berperan dalam urusan rumah tangga (stereotype tiang wingking); dan (2) belum diterapkannya diversifikasi pangan karena lebih berorientasi padi, sehingga banyak lahan yang bera dan tidak ditanami dengan jenis tanaman pangan lainnya seperti palawija.****



KILAS BALIK SEJARAH RADIO TERBESAR SE-ASIA

Oleh: Rudianto

Gunung Puntang merupakan kawasan wisata Bumi Perkemahan yang berada di Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan wisata yang eksotis, udaranya yang sejuk, masih banyaknya pepohonan, sungai-sungai yang airnya jernih, bebatuan dan hewan yang dilindungi (Oa Jawa), berbagai fasilitas seperti sarana *camping*, mushola, toilet, jembatan dan warung. Menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan lokal dan luar daerah termasuk wisatawan manca negara.

Selain itu, Gunung Puntang bukan saja menyajikan pesona alamnya yang sejuk dan asri, disamping itu tidak terlepas dari catatan sejarah dunia, yang melegenda beberapa abad yang lalu. Terbukti dengan adanya jejak peninggalan Belanda serta bukti sejarahnya puing-puing yang tinggalan pada masa itu. Di abad ke-16 di tahun 1595, Linscosten berhasil menemukan beberapa tempat di Pulau Jawa yang bebas dari kekuasaan Portugis. Dimana tempat tersebut banyak rempah-rempah yang dihasilkan dan bisa dijual belikan di perdagangan Internasional.

Tidak berselang lama Linscosten,

menginjakan kakinya di tanah Indonesia, Empat buah kapal dagang dari Belanda tiba di Indonesia, di bawah pimpinan Cornelis de Houtmen. Kedatangannya ke Indonesia tidak lain untuk menguasai Pulau Jawa, kekuasaannya merambah ke beberapa daerah termasuk daerah Bandung Selatan dan berhasil menguasai wilayah Gunung Malabar dan Gunung Puntang serta gunung-gunung disekitarnya, dan juga menjadikan Gunung Puntang sebagai pusat penyebaran Informasi pemerintahan Hindia Belanda melalui sinyal nirkabel yang buatnya, tidak banyak diketahui oleh para ahli sejarah, bahwa ini merupakan jaringan nirkabel pertama di dunia yang dapat menjangkau antar benua dari Indonesia ke Belanda dengan jarak jangkauan lebih dari 12 ribu kilometer pada masa itu.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Gunung Puntang dijadikan pusat penyebaran Informasi seperti yang digambarkan di atas, dengan didirikannya stasiun Pemancar Radio terbesar se-Asia yang didirikan Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1917, dengan tujuan untuk memperlancar informasi perkembangan Indonesia sebagai negara jajahan Pemerintahan Kolonial Belanda dengan sebutan *Nederland Indies*.

Pembangunan Radio ini dibuat dan dipimpin



Gua Belanda

Oleh seorang teknisi dari Belanda bernama Cornelius Johannes de Groot. Dengan menggunakan alat yang dilengkapi pemancar buatan Jerman, Prof. Dr. Ir Cornelius Johannes de Groot sebagai pelopor, dan berhasil memimpin serta merampungkan seluruh pembangunannya dan diresmikan oleh Dirk Fork pada Tanggal 5 Mei 1923.

Dengan panjang 2 kilometer, membentang di antara Gunung Halimun dan Gunung Malabar dengan ketinggian 500 meter dari dasar lembah, 1200 meter di atas permukaan laut. Dalam penggunaan radio ini murni pemancar, wilayah padalarang berjarak (15 km) dan Wilayah Rancaek (18 km) sebagai penerimanya. Memang cukup boros energi, agar tetap bisa digunakan Belanda kemudian membangun pembangkit listriknya.

Menurut salah seorang petugas perhutani Cecep Mulyadi (50) warga kampung Palalangan Desa Campaka Mulya, Kecamatan Cimaung, ini menuturkan. "Maka dibangunlah tiga pembangkit listrik di tiga wilayah. Pertama, Pembangkit Listrik Tenaga Air, di pangalengan lengkap dengan pendistri busiannya, kedua disebalah utara kota Bandung (Dago), juga dibangun (PLTA), dan yang ketiga menggunakan pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah Dayehkolot. Memang cukup boros dan membutuhkan banyak tenaga listrik," tutur Mulyadi sambil meneguk air kopi, yang sudah tersedia di meja kantor sekretariat perhutani.

Di kawasan Gunung Puntang, juga terdapat Rumah dinas para teknisi berjumlah sepuluh rumah, dan dinamakan Gedong Sepuluh. Tapi sayang radio yang mendunia ini, sekarang tinggal sejarah dan puing-puing saja yang banyak menyimpan cerita, karena dulu dimasa Bandung Lautan Api, bangunan radio terbesar se-Asia ini dihancurkan, oleh Belanda dan sabotase para pejuang Indonesia pada tahun 1946, agar tidak digunakan oleh Pemerintahan Jepang, dan semua bangunan dilokasi tersebut,

hancur termasuk bangunan Gedung Sepuluh hancur lebur," ucap Mulyadi.

KOLAM CINTA

Selain radio di depan bangunannya terdapat sebuah kolam yang melegenda yang konon kalau ada pasangan kekasih yang berenang atau mencuci muka, maka pasangan ini akan sampai dan melangsungkan pernikahan.

Dulu kolam ini menjadi tempat favorit para *meneer* serta noni Belanda untuk berenang dan tepat dibangun didepan kantor pemancar radio yang berbentuk hati sehingga disebut Kolam Cinta. Menurut Mulyadi Kolam Cinta masih bisa dinikmati walau keadaannya rusak dan tidak terawat.



Cecep Mulyadi sedang menunjukkan salah satu gambar keadaan di dalam bangunan pemancar radio malabar

GEDONG SABAHU

Sisa puing-puing bangunan yang terdapat digunung Puntang bukan hanya kolam cinta ada juga bekas rumah dinas para *meneer*, yang menjadi petugas menjalankan pemancar radio dan namanya masih terpampang di bekas rumah dinas tersebut. seperti Mr Han Key, Mr Nelan, Mr Vallaken, Mr, Bickman, Mr Hodskey, dan Ir Keh Kong, yang hancur akibat serangan tentara Jepang. Dan sekarang lokasi kompleks tersebut dijadikan tempat untuk main perang-perangan oleh pecinta olah raga *paintball*.

GUABELANDA

Selain radio dan Kolam Cinta, masih terdapat sisa sejarah lainnya, tidak jauh dari bekas kompleks rumah dinas terdapat sebuah gua dengan panjang 200 meter, yang biasa disebut oleh warga dan para pengunjung Gua Belanda.

"Gua ini dulunya digunakan untuk menyimpan, senjata, peralatan, dan barang karena pada saat itu daerah Gunung Puntang menjadi daerah serangan tentara Jepang, termasuk semua bangunan di luluh lantakkan dengan menyisakan puing-puing yang berserakan" pungkas Cecep Mulyadi. ****



Sesjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo memberikan sambutan pada acara pelantikan di Lt.5 Kantor Setjen Wantannas (18/11/16)



Kegiatan Tim Kajilu di Lab.Seiberdorf, Austria. meninjau program-program IAEA dalam pemanfaatan teknologi nuklir Kamis (27/10/2016)



Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprpdiono dalam acara Sosialisasi di lingkungan Setjen Wantannas Jumat (11/11/2016)



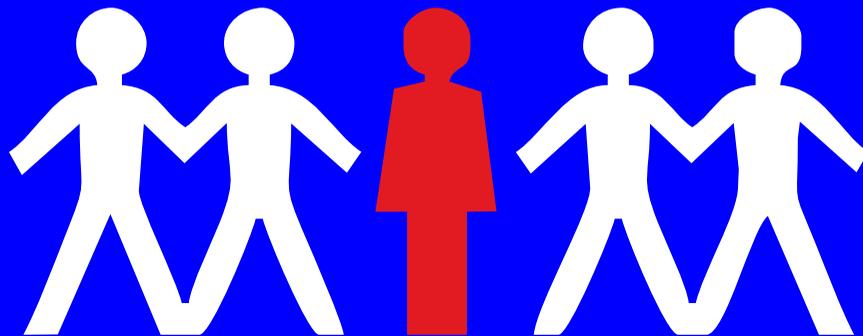
Pelaksanaan Rakertas di Hotel Sunlake Sunter Jakarta (3/11/16)

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.



SABERPUNGLI

Sms: 1193 / Call Center: 193



STOP!!!

**PUNGUTAN LIAR
SEKARANG JUGA**